



ISSN Print:
e-ISSN: 2657-0343



Kantor Editor: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang Sumatera Selatan-30139 Indonesia.

Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179

E-mail : lexlatamihunsri@gmail.com

Website : <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>

MODEL PENEGAKAN HUKUM PROGRESIF DALAM PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA MELALUI PIDANA UANG PENGANTI

Nandang Sambas* dan Ade Mahmud**

Abstrak: Tujuan utama pembayaran pidana uang pengganti adalah memulihkan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi yang wajib dibayarkan terpidana sesuai dengan nilai kerugian negara yang ditimbulkan. Pidana uang pengganti semestinya dibayar untuk mengembalikan kerugian negara secara utuh, tetapi eksekusi uang pengganti terbentur persoalan yuridis yang memberi ruang terpidana mengganti dengan menjalani pidana subsider. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian deskriptif analitis, menggunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data studi kepustakaan dengan teknik analisis secara kualitatif. Kendala yang mempengaruhi proses pembayaran pidana uang pengganti meliputi *pertama*, Undang-Undang c.q Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Kedua*, penegak hukum tidak segera melakukan pelacakan, pembekuan dan penyitaan uang/aset hasil tindak pidana korupsi. *Ketiga*, modus operandi pelaku melalui pencucian uang. Model penegakan hukum progresif mengembalikan kerugian negara adalah mengubah paradigma penegak hukum bahwa sanksi pidana yang tepat adalah sanksi yang berorientasi pada uang/aset hasil korupsi (*follow the money and asset recovery*) dengan melakukan pelacakan, pembekuan dan penyitaan aset hasil tindak pidana korupsi sejak tahap penyidikan diikuti dengan putusan kewajiban membayar uang pengganti tanpa mensubsidairkannya dengan pidana penjara sehingga tetap membebankan tanggung jawab hukum kepada terdakwa untuk mengembalikan kerugian negara.

Kata Kunci : Penegakan Hukum Progresif, Pidana Uang Pengganti.

Abstract: Criminal replacement money should be paid to restore the full loss of the state, but the execution of replacement money is banned by juridical issues which give the convict room to replace it with subsidized crime. The research method used normative juridical approach. Specific analytical descriptive research, using secondary data. Technique of collecting data of literature study with qualitative analysis technique. Constraints affecting the process of repayment of the replacement money include the first, the legislation c.q. Article 18 paragraph (3) Corruption Eradication Act. Secondly, law enforcement factors they do not immediately conduct tracking, freezing and confiscation of money / assets resulted from criminal acts of corruption. Third, the modus operandi of the perpetrator through money laundering. Progressive law enforcement restore the state's losses is to change the law enforcement paradigm that appropriate criminal sanctions are sanctions oriented to the of money / assets of the proceeds of corruption by tracking, suspending and seizure of assets of proceeds of crime corruption since the investigation phase followed by the decision on the payment of the surrogate money without substituting it with imprisonment so that it still imposes legal liability to the perpetrator to return the state losses.

Keyword : Progressive Law Enforcement, Criminal Replacement Money.

* Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung
 ** Fakultas Hukum Universitas Islam
 Bandung
 Email: ademahmud100@yahoo.com

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan jenis kejahatan yang berdimensi *extra ordinary crime*, sehingga harus ditangani dengan cara-cara luar biasa pula.¹ Korupsi menjadi salah satu problematika dari sekian banyak masalah kebangsaan lainnya.² Momentum tindak pidana korupsi mengalami peningkatan ketika masa pemerintahan Orde Baru dengan skala besar yang dilakukan Pertamina tahun 1975 dengan kerugian diperkirakan sekitar 12,5 miliar dollar AS tanpa ada tindakan hukum pada pihak-pihak yang terlibat, kemudian dengan mengalirnya dana utang luar negeri rata-rata 5 miliar dollar AS per tahun.³ Pada saat rezim Orde Baru berakhir, stok utang sekitar 70 miliar dollar AS. Investasi langsung perusahaan asing, eksploitasi sumber daya alam (terutama migas dan hutan) yang menjadi sumber dana domestik yang kolosal, maka perkembangan dan pertumbuhan jenis korupsi yang tradisional seperti upeti, sogok, nepotisme dan seterusnya maupun bentuk baru seperti kolusi, mafia peradilan, penggelapan pajak, komersialisasi jabatan, *mark up* rekayasa finansial dan seterusnya menjadi berkembang di Indonesia.⁴

Dalam majalah *Der Spiegel* Edisi Juli 1995 dan Majalah *Fortune* Edisi Agustus 1995, tingkat kerawanan tindak pidana korupsi di Indonesia mendapat peringkat terburuk hampir sama dengan korupsi di Republik Rakyat Cina (RRC). *Transparency International* (TI) dalam penelitiannya di

tahun 1998-2003, menempatkan Indonesia pada posisi 10 besar negara paling korups di dunia. Demikian pula *Political Economy Risk Consultancy* (PERC) dalam penelitiannya tahun 1997 mengemukakan bahwa Indonesia menempati posisi negar yang terkorup di Asia, dan pada tahun 2001 Indonesia turun peringkat menjadi negara terkorup kedua di Asia setelah Vietnam.⁵

Bangsa Indonesia lebih terperanjat lagi ketika Dato Param Cumaraswamy, pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyimpulkan bahwa korupsi di peradilan Indonesia adalah salah satu yang terburuk di dunia yang mungkin hanya bisa disamai dengan negara Meksiko, di mata para pembisnis khususnya para investor Asia, korupsi di Indonesia dalam hal ini adalah korupsi di pengadilan, Indonesia memperoleh skor 8,03 dari skala 1 sampai dengan 10, dengan catatan yang mendapat skor 1 adalah yang terbaik dan yang mendapat skor 10 adalah yang terburuk. Skor ini tepat berada di atas negara Philipina yang memperoleh angka 9,40 dan sama dengan Thailand yang juga mendapat skor 8, 03.⁶

Pemberantasan korupsi di Indonesia memerlukan keyakinan dan tekad yang besar dari semua pihak untuk membebaskan diri dari penyakit yang telah kronis tersebut di masa depan. Oleh karena itu, bangsa Indonesia hendaknya dapat mengambil hikmah sebesar-besarnya dalam upaya untuk keluar dari *image* negara terkorup.⁷ Salah satu faktor yang mendorong terus meningkatnya angka tindak pidana korupsi di Indonesia adalah sanksi yang dijatuhkan hakim bagi para koruptor di Indonesia masih ringan, bahkan cenderung mudah dikurangi dan kemudian dimaafkan. Tantangan bagi aparat

¹ Munir Fuady, *Bisnis Kotor, Anatomi Kejahatan Kerah Putih*, PT Citra Aditya Bakti, 2004, hlm 22.

² Anshar dan Suwito, *'Infera Petita, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang Menerobos Ketentuan Pidana Minimum'*, (2018) 11 Jurnal Yudisial, hlm 152.

³ Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi, Element Sistem Integrasi Nasional*, Yayasan Obor Indonesia, 2003, hlm 7.

⁴ *Ibid*

⁵ Chaerudin dkk, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Reflika Aditama, 2008, hlm V.

⁶ Igantius Haryanto dalam Arya Maheka, *Mengenal dan Memberantas Korupsi*, Jakarta: Komisi Pembeantasan Korupsi Republik Indonesia, Tanpa Tahun, hlm 2.

⁷ Didin S Damanhuri, *Korupsi, Reformasi, Birokrasi dan Masa Depan Ekonomi Indonesia*, Jakarta:Lembaga Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2006, hlm 3.

penegak hukum adalah bagaimana supaya hukuman yang diberikan membuat para koruptor jera sekaligus membuat yang lain takut untuk melakukan korupsi.⁸ Fungsi sanksi pidana bukan hanya sekedar dipenjara, tetapi juga melahirkan rasa jera, malu, dan takut. Menimbulkan efek jera ini justru sangat penting guna memperkecil angka korupsi di Indonesia dari tahun ke tahun.⁹

Kenyataan menunjukkan bahwa sejumlah terpidana korupsi dipenjara di bawah 10 (sepuluh) tahun dengan mendapat potongan masa tahanan serta remisi di hari-hari raya lebaran dan HUT kemerdekaan, akhirnya mereka hanya dipenjara sekitar 3 (tiga) sampai 5 (lima) tahun saja. Fakta ini tidak sebanding dengan uang negara yang dikorupsi dari belasan sampai puluhan miliar rupiah,¹⁰ besar kemungkinan bahwa pidana yang dijatuhkan hakim menimbulkan ketidakadilan.¹¹ Padahal fungsi sanksi dalam hukum pidana adalah untuk mendatangkan penderitaan atau nestapa (*leed*).¹²

Maraknya tindak pidana korupsi menjadi inisiatif munculnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bertugas khusus melakukan penegakan hukum terhadap korupsi.¹³ Menurut data Litbang KPK nilai kerugian negara akibat tindak pidana korupsi di Indonesia selama 2009-2017 mencapai Rp 153,01 triliun (seratus lima puluh tiga koma satu triliun). Sedangkan jumlah hukuman finansial yang berhasil mengembalikan kerugian negara berupa

denda, penyitaan aset dan pembayaran uang pengganti hanya terkumpul Rp 18. 957. 821. 529. 773.- (delapan belas triliun lebih) atau sekitar 12,3 %. Total kerugian negara itu berasal dari 2.321 kasus yang melibatkan 3.109 terdakwa. Data ini menunjukkan bahwa hukuman finansial kepada para terpidana korupsi cenderung suboptimal, lebih rendah dari kerugian negara yang muncul akibat korupsi.¹⁴ Sementara keuntungan ekonomis yang diperoleh para terpidana mencapai puluhan sampai ratusan miliar rupiah, sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat yang menjadi korban tindak pidana korupsi dan sanksi yang demikian tidak memberikan efek jera. Oleh karena itu diperlukan solusi terkait sanksi pidana yang serasi untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi agar dapat menurunkan angka tindak pidana korupsi di Indonesia dan yang terpenting bagaimana penegakan hukum pidana itu mampu mengembalikan kerugian keuangan yang diderita oleh negara dengan mengoptimalkan pelaksanaan pembayaran pidana uang pengganti.

Secara normatif ketentuan mengenai pembayaran pidana uang pengganti telah diatur dalam Pasal 18 Undang-undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur tentang pidana tambahan sebagai usaha untuk pengembalian kerugian negara akibat korupsi yang mengatur sebagai berikut:

- (1). Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang

⁸ Ade Mahmud, '*Dinamika Pidana Uang Pengganti Akibat Tindak Pidana Korupsi*', (2017) 3 Jurnal Hukum Mimbar Justitia, (2017), hlm 139.

⁹ Yesmil Anwar, '*Pembaharuan Hukum Pidana*', PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2008, hlm 270.

¹⁰ Zainudin HM, '*Abraham Samad*', Ufuk Press, 2012, hlm 120.

¹¹ Mahrus Ali, '*Proporsionalitas Dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*', (2018) 25 Jurnal Ius Quia Iustum, hlm 138.

¹² Yoserwan, '*Penerapan Fungsi Sekunder Hukum Pidana Oleh Aparat Penegak Hukum Dalam Hukum Pidana Ekonomi*', (2017), 1 Jurnal Nagari Law Review, hlm 16.

¹³ Putra Perdana, '*Peran Perguruan Tinggi Dalam Menumbuhkan Budaya Anti Korupsi DI Indonesia*', (2018), 47 Jurnal Hukum dan Pembangunan, hlm 460.

¹⁴ Marwan Mas, '*Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*', Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015, hlm 146. Tahun 2016-2017 KPK berhasil mengembalikan 3,55 Triliun

- menggantikan barang-barang tersebut.
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
 - c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu yang paling lama 1 (satu) tahun.
 - d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
- (2). Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutup uang pengganti tersebut.
- (3). Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Ketentuan di atas menunjukkan bahwa dasar hukum upaya pengembalian kerugian negara melalui pembayaran pidana uang pengganti. Aturan ini dalam hukum pidana ada di wilayah penindakan (tindakan represif).¹⁵ Pengembalian uang oleh terpidana sangatlah penting apalagi untuk pengembangan pembangunan demi tercapainya masyarakat yang sejahtera.¹⁶

¹⁵ Mohammad Sahlan, '*Unsur Menyalahgunakan Kewenangan Dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kompetensi Absolut Peradilan Administrasi*', 2016, 23 Jurnal Ius Quia Iustum hlm 288.

¹⁶ Christin Juliana sinaga, '*Kajian Terhadap Pidana Penjara Sebagai subsider Pidana Tambahan*

Tetapi kenyataan dalam praktek peradilan menunjukkan bahwa hakim telah menjatuhkan putusan pembayaran pidana uang pengganti sesuai dengan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan pelaku, tetapi pada saat di eksekusi jaksa, terpidana tidak memiliki harta/aset yang mencukupi untuk membayar pidana uang pengganti dan pada akhirnya pidana uang pengganti disubsider dengan pidana penjara pengganti yang lamanya tidak melebihi pidana pokok yang dijatuhkan.¹⁷

Praktek penggantian pembayaran pidana uang pengganti dengan pidana penjara pengganti semacam ini mengakibatkan putusan hakim berupa kewajiban membayar uang pengganti tidak mampu mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi dan tidak menimbulkan efek jera. Padahal korupsi sangat merugikan negara, maka sanksi pidana yang dijatuhkan hakim di pengadilan pun seharusnya sanksi pidana yang berorientasi pada pengembalian kerugian materil yang diderita negara.

Upaya pengembalian kerugian keuangan negara melalui pembayaran pidana uang pengganti perlu dilakukan dengan mekanisme penegakan hukum yang progresif yang menuntut kreativitas penegak hukum khususnya hakim ketika menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana korupsi. Hakim tidak boleh terkungkung oleh dengan teks perundang-undangan yang mengatur

Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi', (2017) 11 Jurnal Wawasan Yuridika hlm 194.

¹⁷ Dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pidana pembayaran uang pengganti dimungkinkan dapat diganti dengan pidana penjara pengganti apabila terpidana korupsi tidak memiliki harta yang mencukupi untuk membayar pidana pembayaran uang pengganti. Ketentuan ini menjadi celah hukum bagi para koruptor untuk meloloskan diri dari kewajiban mengganti kerugian keuangan negara akibat korupsi melalui pidana uang pengganti dengan mengatakan/mengakui bahwa dirinya tidak memiliki harta yang cukup untuk mengembalikan kerugian negara sehingga secara otomatis pidana uang pengganti digantikan dengan pidana penjara pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Korupsi.

tentang ketentuan pidana dalam undang-undang korupsi. Hakim tidak boleh hanya menjadi “mulut” undang-undang melainkan juga “mulut” keadilan.¹⁸ Hakim perlu menerapkan prinsip ekonomi atas hukum pidana,¹⁹ sebagai dasar atas penjatuhan pidana kepada pelaku korupsi, mewajibkan terpidana untuk membayar uang pengganti sebesar-besarnya kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatannya.²⁰ Akan tetapi sampai saat ini belum ada putusan yang menunjukkan progresifitas putusan hakim terkait pembayaran pidana uang pengganti, sehingga kecenderungannya adalah setiap putusan uang pengganti dijatuhkan selama itu pula akan disubsider/diganti dengan pidana penjara.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas persoalan yang muncul adalah : (1) Apakah kendala yang mempengaruhi proses pembayaran pidana uang pengganti akibat tindak pidana korupsi? (2) Bagaimana model penegakan hukum progresif dalam mengembalikan kerugian keuangan negara melalui pidana uang pengganti?

ANALISIS DAN DISKUSI

Faktor yang Mempengaruhi Proses Pembayaran Pidana Uang Pengganti Akibat Tindak Pidana Korupsi

Pelaksanaan eksekusi pidana pembayaran uang pengganti pada dasarnya juga merupakan masalah penegakan hukum. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan eksekusi pidana pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, terlebih dulu perlu dikemukakan pendapat Soerjono Soekanto tentang faktor-faktor yang

mempengaruhi penegakan hukum, antara lain:²¹

1. Faktor Undang-undang
2. Faktor penegak hukum
3. Faktor Sarana dan prasarana
4. Faktor masyarakat
5. Faktor kebudayaan

Kelima faktor di atas saling berkaitan erat. Oleh karena itu, kelima faktor tersebut merupakan esensi dari penegakan hukum, dan juga merupakan tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum, termasuk juga di dalamnya proses penegakan hukum dalam rangka mengembalikan kerugian keuangan negara melalui pidana pembayaran uang pengganti. Kelima faktor di atas juga turut menjadi faktor yang sangat mempengaruhi pidana pembayaran uang pengganti untuk mengembalikan kerugian keuangan negara. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi proses pidana pembayaran uang pengganti antara lain:

1. Faktor Hukumnya sendiri (Undang-undang)

Proses eksekusi pidana pembayaran uang pengganti pada dasarnya juga merupakan masalah penegakan hukum. Sehubungan hal tersebut, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pidana pembayaran uang pengganti hasil tindak pidana korupsi adalah Undang-undang No 31 tahun 1999 Jo Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka dari faktor hukumnya sendiri telah memiliki dasar hukum yang jelas dan tegas. Akan tetapi ketentuan pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-undang No 31 Tahun 1999 memberikan celah hukum yang menyatakan bahwa:

“Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud

¹⁸ Fahmiron, *‘Independensi dan Akuntabilitas Hakim Dalam Penegakan Hukum Sebagai Wujud Independeni dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman’*, (2016) 17 Jurnal Litigasi, hlm 3469.

¹⁹ Prinsip ekonomi atas hukum pidana memiliki arti bahwa dalam penegakan kebijakan hukum pidana harus memperhatikan *cost and benefit*

²⁰ Johnny Ibrahim, *Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum*, ITS Press, 2009, hlm 51.

²¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, 2012, hlm 8.

dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan”

Lahirnya rumusan pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mencerminkan adanya *political will* dari pembentuk undang-undang untuk mengambil kembali uang negara yang dikorupsi oleh pelaku melalui pidana pembayaran uang pengganti. Namun rumusan Pasal 18 ayat (3) ini memberikan kelonggaran bagi setiap terpidana korupsi untuk dapat mengganti pidana pembayaran uang pengganti dengan pidana penjara bilamana terpidana tidak memiliki cukup uang/aset untuk mengganti kerugian negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi yang dilakukannya.

Kelonggaran hukum yang terdapat dalam rumusan pidana tambahan inilah yang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi (menghambat) pelaksanaan pidana pembayaran uang pengganti akibat tindak pidana korupsi. Akibatnya mayoritas terpidana “beramai-ramai” menyatakan diri atau mengakui bahwa dirinya tidak memiliki cukup uang/aset untuk membayar uang pengganti, padahal kenyataannya mereka telah menyembunyikan hartanya ke tempat-tempat yang sulit dilacak keberadaannya oleh penegak hukum.

2. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum ikut mempengaruhi kelancaran proses eksekusi pidana pembayaran uang pengganti dalam perkara korupsi. Penegak hukum seringkali mengalami berbagai kesulitan dalam mengeksekusi harta pelaku yang diduga hasil tindak pidana korupsi dan telah ditetapkan sebagai harta yang akan digunakan untuk membayar pidana uang pengganti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menurut penulis kesulitan ini disebabkan karena para penegak hukum baik Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi tidak segera melakukan pelacakan aset (*asset tracking*) dan pembekuan aset (*freezing*) yang diduga keras hasil tindak pidana korupsi pada saat penyidikan dimulai atau ketika sedang berlangsung. Sementara ketika pelaku korupsi menyadari bahwa dirinya telah menjadi target operasi dari penegakan hukum yang sedang berlangsung, maka pelaku sesegera mungkin menyembunyikan atau mengaburkan aset-aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi dengan masukan uang haram itu kepada lembaga keuangan baik bank maupun non bank, baik ke dalam negeri maupun ke luar negeri. Dengan kata lain, penegak hukum kalah cepat dari pelaku untuk menyembunyikan uang atau aset hasil korupsi yang pada akhirnya menyulitkan jaksa mengeksekusi pidana pembayaran uang pengganti karena pelaku sudah terlebih dahulu menyembunyikan uang hasil korupsi dan “berpura-pura” tidak memiliki aset yang cukup untuk membayar uang pengganti. Sehingga apabila kondisi itu terjadi maka secara otomatis berlaku ketentuan Pasal 18 ayat (3) yang notabennya akan menguntungkan pelaku untuk mengganti pidana pembayaran uang pengganti dengan pidana penjara pengganti yang selama ini masih cukup ringan rata-rata berkisar 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan. Seperti yang terlihat pada bagan di bawah ini:²²

Tabel 2.1.
Disparitas Uang Pengganti dengan Pidana
Subsidernya

²² Ade Mahmud, *Op. Cit.*, hlm 146.

No	Putusan	Uang Pengganti	Pidana Penjara Pengganti
1	No 746 K/Pid.Sus/201 0	Rp. 115.381.1 89	6 bulan
2	No 17 K/Pid.Sus/201 0	Rp 148.145.8 33	2 bulan
3	No 2790 K/Pid.Sus/201 1	Rp 150.000.0 00	3 bulan
4	No 1087 K/Pid.Sus/201 2	Rp. 150.000.0 00	5 bulan
5	No 2360 K/Pid.Sus/201 3	Rp 155.000.0 00	15 bulan
6	No 11K/Pid.Sus/2 014	Rp. 599.550.0 00	8 bulan
7	No 1/K/Pid.Sus/20 15	Rp. 681.045.4 54	6 bulan

Sumber : Sistem Informasi MA. Tahun 2015.

Data ini menunjukkan bahwa dalam praktik pengembalian kerugian negara (*asset recovery*) tidak berjalan seperti yang menjadi harapan masyarakat luas. Pelaku lebih memilih tidak melunasi uang pengganti atau lebih memilih menggantinya dengan pidana penjara (*subsider*). Persoalan lain yang terlihat dari data di atas juga memperlihatkan adanya pola ketidaksebandingan dalam menentukan besaran bobot pidana penjara pengganti karena pidana uang pengganti disubsiderkan dengan beberapa bulan saja.

Praktek penggantian pidana uang pengganti dengan pidana penjara pengganti apabila dikaji secara proporsional, tidak mencerminkan keadilan bagi masyarakat yang menjadi korban tindak pidana korupsi karena kerugian negara yang terjadi menimbulkan dimensi *victim* yang cukup luas dan masyarakat miskin yang menjadi korban, selama ini keberadaan korban tindak pidana

tidak terlalu mendapat perhatian.²³ Sedangkan pelaku hanya menggantinya/menebusnya dengan beberapa bulan penjara. Putusan ini akan menyebabkan kepercayaan masyarakat pada lembaga peradilan melemah.²⁴ Perumusan sanksi pidana semacam ini tidak sebanding dengan dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi yang menyebabkan timbulnya kerugian keuangan negara.

3. Faktor Perkembangan Modus Operandi

Faktor lain yang mempengaruhi kelancaran dari proses eksekusi pidana pembayaran uang pengganti adalah modus operandi yang dilakukan pelaku untuk menyamarkan, mengaburkan asal-usul uang hasil korupsi dengan cara melakukan pencucian uang melalui sistem keuangan. *Money laundering* merupakan modus operandi yang banyak dilakukan pelaku korupsi untuk menghilangkan jejak dan menyamarkan uang hasil korupsi. Pada titik ini faktor yang mempengaruhi (menghambat) eksekusi pidana pembayaran uang pengganti ketika pelaku melakukan pencucian uang dan telah sampai pada tahap *integration* yaitu penempatan uang/aset yang sudah melampaui tahap *placement* dan *layering* untuk menjadi investasi yang benar-benar legal. Pada tahap ini uang/aset diintegrasikan ke dalam sistem finansial yang legal dan diasimilasikan dengan semua aset yang ada dalam sistem finansial. Jadi pelaku berusaha untuk menetapkan landasan sebagai suatu *legitimate explanation* bagi hasil kejahatan.²⁵ Ketika pelaku telah melakukan pencucian uang dan telah sampai pada tahap *integration* kemudian pelaku dijatuhi pidana pembayaran uang pengganti, bagi jaksa eksekutor sudah cukup sulit untuk melacak keberadaan uang/aset tersebut.

²³ Mahrus Ali dan Ari Wibowo, '*Kompensasi dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana*', 2018, 33 Jurnal Yuridika, hlm 261.

²⁴ Nimerodi Gulio dan Ade Kurniawan, '*Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana*', 2018, 47 Jurnal Masalah Hukum, hlm 218.

²⁵ Edi Setiadi dan Rena Yulia, '*Hukum Pidana Ekonomi*', Graha Ilmu, 2010, hlm 156.

Modus operandi yang dilakukan adalah dengan melakukan transaksi yang bersih, dana yang telah digunakan untuk transaksi yang berlapis-lapis digunakan untuk pembayaran, kemudian transaksi itu dapat dilakukan melalui lembaga keuangan biasa sebagai bagian dari transaksi yang sah.²⁶ Menurut penulis tahap *integration* merupakan titik yang paling sulit untuk melacak keberadaan uang/aset hasil korupsi. Bertambah sulit apabila terdapat rentan waktu yang cukup lama antara *tempus delicti* dengan penyidikan perkaranya, maka pelaku sudah sedari awal menyamarkan uang/aset hasil korupsi.

Pada saat *money laundering* telah dilaksanakan sampai pada tahap *integration*, maka ada tiga faktor yang akan dilakukan pelaku, yaitu *pertama*, merahasiakan siapa pemilik uang hasil kejahatan tersebut, *kedua*, merahasiakan proses pemutihan sehingga menyulitkan pelacakan, *ketiga*, mudah diawasi oleh pemilik sebenarnya.

Berdasarkan uraian di atas nampak bahwa terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan pidana pembayaran uang pengganti akibat tindak pidana korupsi baik dari undang-undangnya, penegak hukumnya, maupun perkembangan modus operandi pelaku dalam menyamarkan asal-usul uang/aset hasil korupsi terutama dengan melibatkan lembaga-lembaga keuangan baik bank maupun non bank.

Model Penegakan Hukum Progresif Dalam Pengembalian Kerugian Negara Melalui Pembayaran Pidana Uang Pengganti

Penegakan hukum menanggulangi kejahatan korupsi saat ini perlu dilakukan melalui pendekatan hukum progresif. Kehadiran hukum progresif bukanlah suatu yang kebetulan, bukan sesuatu yang lahir tanpa sebab dan bukan sesuatu yang jatuh dari langit. Hukum progresif adalah bagian dari proses pencarian kebenaran yang tidak pernah berhenti. Hukum progresif dipandang sebagai konsep yang sedang mencari jati diri bertolak dari realitas empiris bekerjanya hukum dalam

masyarakat, berupa ketidakpuasan dan keprihatinan terhadap kinerja dan kualitas penegak hukum di Indonesia.²⁷

Terobosan hukum optimalisasi pidana uang pengganti melalui penegakan hukum progresif bukanlah terobosan hukum yang bersifat emosional melainkan terobosan hukum yang rasional dan berlandaskan pada argumentasi teoritik. Landasan teoritis optimalisasi pidana uang pengganti adalah dengan menggunakan kacamata hukum progresif yang setia pada asas besar bahwa “hukum adalah untuk manusia bukan sebaliknya” sebagai pintu masuk dan titik pandang (*point of view*).²⁸ Hukum progresif melihat hukum selalu berada dalam proses untuk terus menerus menjadi (*law as proces, law in the making*) dan tidak memandang hukum dari kacamata hukum itu sendiri, tetapi dilihat dari tujuan sosial yang ingin dicapai, dan menjaga keseimbangan kepentingan rasa keadilan bagi korban dan negara.²⁹

Berangkat dari asumsi bahwa hukum itu untuk manusia, maka penegak hukum seharusnya bukan hanya sekedar memahami hukum positif yang berlaku, tetapi bagaimana seorang penegak hukum mampu mengangkat nilai-nilai yang bermuara pada sebuah keadilan yang sesungguhnya, bukan hanya keadilan yang hanya berdasarkan rentetan kata-kata atau kalimat dalam peraturan perundang-undangan saja tetapi pada keadilan yang nyata.³⁰

Para penegak hukum harus mengedepankan kejujuran dan mempunyai empati dan kepedulian terhadap penderitaan rakyat akibat tindak pidana korupsi yang

²⁷ Satjipto Rahardjo, ‘*Hukum yang Membebaskan*’, 1 Jurnal Hukum Progresif, hlm 3.

²⁸ Dey Ravana, *Wacana Konsep Hukum Progresif Dalam Peegakan Hukum di Indonesia Dalam Hukum Untuk Manusia Kado (tak) Istimewa Fakultas Hukum Untuk Indonesia*, Pilar Utama Mandiri, 2012, hlm 338.

²⁹ Hambali Yusuf an Saifullah Basri, ‘*Model Penyelesaian Alternatif Perkara Pidana Dalam Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*’, 2018, 26 Jurnal Legality, hlm 54.

³⁰ Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm 3.

²⁶ *Ibid*

terjadi selama ini. Keadilan harus menjadi titik orientasi dan tujuan akhir dari penegakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana korupsi.³¹ Penegakan hukum yang progresif tidak lagi berpusat pada peraturan, akan tetapi pada kreativitas penegak hukum untuk mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Para penegak hukum yang progresif dapat melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada, tanpa harus menunggu perubahan peraturan. Peraturan hukum yang buruk tidak harus menjadi penghalang bagi penegak hukum yang progresif untuk menghadirkan keadilan bagi rakyat yang menjadi korban tindak pidana korupsi, karena mereka dapat melakukan interpretasi secara baru setiap kali terhadap suatu peraturan.³²

Mengapa pusat perhatian ada pada penegak hukum bukan pada peraturan, karena masalah penegak hukum pada dasarnya merupakan kesenjangan antara hukum secara normatif (*das sollen*) dan hukum secara sosiologis (*das sein*) atau kesenjangan antara perilaku masyarakat yang seharusnya dengan perilaku masyarakat yang senyatanya. Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang berjalan selama ini masih berkuat pada keadilan prosedural yang sangat menekankan kepada aspek regularitas dan penerapan formalitas legal semata. Sejalan dengan itu rekayasa hukum menjadi aroma yang cukup kuat dalam hampir setiap penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di negeri ini. Keadilan substantif sebagai sumber dari keadilan formal masih bersifat konsep parsial dan belum menjangkau seutuhnya ide-ide dan realitas yang seharusnya menjadi bagian intrinsip dari konsep penegakan keadilan. Akibatnya penegakan hukum menjadi kurang mampu menyelesaikan inti persoalan yang sebenarnya.³³

Inti persoalan hukum yang seharusnya menjadi perhatian dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah bagaimana penegakan hukum itu mampu mengembalikan kerugian keuangan negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi, karena upaya pengembalian kerugian negara dapat dilakukan dengan penegakan hukum yang progresif, di mana para penegak hukum mampu mengaktualisasikan keadilan substantif yang memperhatikan kepentingan rakyat.

Satjipto Rahardjo menawarkan perlunya penegakan hukum progresif yang pro rakyat dan pro keadilan. Hukum progresif menempatkan dedikasi penegak hukum di garda terdepan, hal ini didasari kenyataan bahwa komunitas penegak hukum dalam pemberantasan korupsi masih berfikir dengan cara-cara klasik.³⁴ Hal ini bisa dilihat dari putusan pengadilan, kejaksaan, kepolisian masih berpikir dan bertindak secara klasik, mereka bersikap sangat submitif terhadap hukum positif, tidak kreatif apalagi berani mematahkan aturan yang ada (*rule breaking*).³⁵

Penegakan hukum progresif dapat dijadikan sarana untuk melakukan optimalisasi pidana pembayaran uang pengganti yang selama ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, dalam arti pelaku tindak pidana korupsi telah dijatuhi sanksi pidana akan tetapi negara tetap mengalami kerugian karena uang yang seharusnya dibayarkan oleh terpidana untuk mengembalikan menutup kerugian negara tidak berhasil karena adanya celah hukum yang bersifat kompromistis.³⁶

Upaya optimalisasi pembayaran pidana uang pengganti dapat dilakukan dengan merubah cara pandang/berfikir pada penegak hukum baik Kepolisian, Kejaksaan, KPK dan Hakim Tipikor bahwa mereka selaku penegak hukum harus mengedepankan hati nurani dan

³¹ M Arief Amrullah, '*Korupsi, Politik dan Pilkada*', 2005, VII Jurnal Syiar Madani Ilmu Hukum, hlm 129.

³² M Syamsudin, '*Kecenderungan Paradigma Berfikir Hakim dalam Memutus Perkara Korupsi*', 2008 15 Jurnal Media Hukum, hlm 202.

³³ Suryantoro, Rifki Budi Putranto dan Anggun Malinda, '*Pemiskinan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Perspektif Analisis Ekonomi Atas Hukum Pidana dan Hukum Progresif*', dalam Mahrus Ali (Ed),

Membumikan Hukum Progresif, Yogyakarta: Aswaja Presindo, hlm 92.

³⁴ *Ibid*

³⁵ *Ibid*, hlm 93.

³⁶ Celah hukum yang bersifat kompromistis dimaksud adalah Ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-undang No 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur bahwa pidana pembayaran uang pengganti dapat diganti/disubsidairkan dengan pidana penjara

peduli pada penderitaan rakyat karena maraknya tindak pidana korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, penegakan hukum yang dilakukan tidak lagi dilakukan dengan penegakan hukum klasik, legalistik, dogmatis yang mengedepankan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penegak hukum harus memandang bahwa korupsi perlu ditangani dengan cara-cara yang luar biasa (*extra ordinary measure*).³⁷ Selanjutnya penegak hukum harus memandang bahwa korupsi berbeda dengan kejahatan-kejahatan lain, khususnya penegak hukum harus memahami bahwa korupsi merupakan kejahatan yang berdimensi ekonomi atau tujuan akhirnya adalah untuk mendapatkan atau memperoleh keuntungan materi dengan cara melawan hukum dan merugikan keuangan negara. Untuk itu, orientasi sanksi pidana bagi pelaku korupsi juga harus sanksi pidana yang berdimensi ekonomis untuk mengembalikan kerugian keuangan negara. Menurut penulis konsep/model paradigma yang harus dibangun oleh penegak hukum mengenai sanksi pidana korupsi adalah harus bergeser dari paradigma *follow the suspect* menjadi *follow the money and asset*.

Bila paradigma di atas tertanam pada nurani penegak hukum di Indonesia, maka tinggal melakukan pengaplikasian terhadap nilai-nilai keadilan yang ada dalam penegakan hukum yang progresif mulai dari penyidikan sampai proses peradilan. Dalam konteks pidana pembayaran uang pengganti hakim dapat melakukan suatu lompatan hukum dengan menjatuhkan putusan pidana pembayaran uang pengganti pada terpidana korupsi tanpa mensubsidairkannya dengan pidana penjara pengganti untuk tetap memberikan tanggung jawab hukum kepada pelaku guna mengembalikan kerugian keuangan negara melalui pidana uang pengganti.

Konsep penegakan hukum progresif pengembalian kerugian negara melalui uang

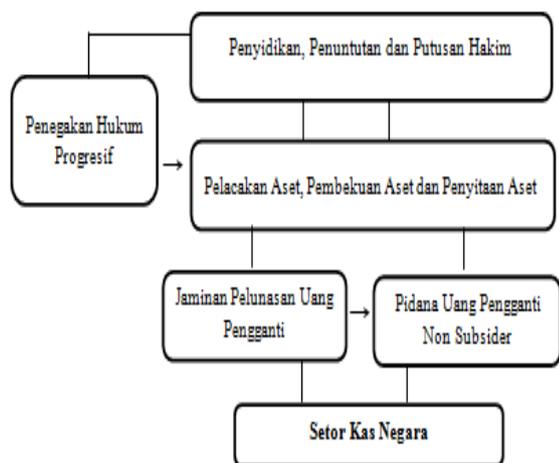
pengganti didasarkan pandangan bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh seseorang telah memenuhi unsur perbuatan korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka secara nalar jika telah ada kerugian negara pasti ada pihak yang diuntungkan/diperkaya baik pelaku maupun pihak lain yang berkaitan (keluarga, teman, pekerja, atasan,) dengan bertambahnya kekayaan pelaku atau pihak lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi secara tidak wajar dan melawan hukum.

Penegakan hukum progresif untuk menutup kerugian negara sangat membutuhkan keberanian hakim dalam menjatuhkan putusan pidana uang pengganti kepada terpidana korupsi tanpa mensubsidairkannya dengan pidana pengganti dan memerlukan dukungan pula sejak tahap penyidikan dan penuntutan yang progresif yaitu dengan melakukan pelacakan aset (*asset tracking*) sesegera mungkin ketika proses penyidikan telah dimulai. Setelah dilakukan pelacakan aset dan aparat penegak hukum menemukan uang/aset yang diduga keras hasil tindak pidana korupsi maka penyidik dan/atau penuntut umum harus segera melakukan pembekuan dan penyitaan aset (*freezing and seizure asset*) untuk menjadi jaminan pelunasan uang pengganti setelah putusan hakim berkekuatan hukum tetap. Apabila dalam putusan majelis hakim menjatuhkan pelaku dengan kewajiban membayar uang pengganti, maka uang/aset pelaku yang telah dibekukan dan disita pada tahap penyidikan atau penuntutan dapat segera dieksekusi oleh jaksa untuk dikembalikan kepada negara sesuai dengan besaran kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan korupsi.

Bagan

Model Penegakan Hukum Progresif Dalam Pengembalian Kerugian Negara Melalui Pidana Uang Pengganti

³⁷ Komariah Emong Sapardjadja, 'Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sejarah Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi', 2005, 3 Jurnal Ilmu Hukum, hlm 161.



Model berhukum secara progresif ini setidaknya dapat digunakan untuk mempermudah proses pengembalian kerugian keuangan negara melalui pidana uang pengganti yang lebih mencerminkan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat, sehingga uang/aset yang berhasil dikembalikan ke kas negara dapat digunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Meskipun undang-undang korupsi memiliki kelemahan dengan adanya ketentuan yang memberikan kesempatan pada terpidana korupsi untuk dapat mengganti pidana uang pengganti dengan pidana penjara. Namun dengan model berhukum progresif maka kelemahan undang-undang tidak menghalangi penegak hukum untuk dapat mengambil kembali kerugian keuangan negara dari pelaku korupsi.³⁸

³⁸ Sekalipun Undang-undang tindak pidana korupsi memiliki ancaman hukuman yang cukup berat karena adanya ancaman hukuman seumur hidup dan pidana mati, akan tetapi tetap saja undang-undang ini belum mencerminkan upaya pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi secara konsisten. Ada dua alasan yang dapat dikemukakan perlunya optimalisasi pidana pembayaran uang pengganti, *Pertama*, motivasi pelaku tindak pidana korupsi (*great corruption*) lebih didasarkan pada motif ekonomis, dalam arti kalkulasi untung rugi menjadi dasar mengapa seseorang melakukan korupsi, sehingga hukuman yang seharusnya dijatuhkan juga harus hukuman yang sesuai dengan motif dilakukannya kejahatan korupsi. *Kedua*, Mayoritas terpidana korupsi dijatuhi pidana penjara, sehingga bila dilihat dari tujuan pemidanaan sanksi pidana penjara bagi terpidana korupsi tidak memberikan manfaat kepada negara selaku pihak yang dirugikan secara materiil. Oleh karena itu melalui penegakan hukum progresif diharapkan proses peradilan pidana bagi perkara

Dengan demikian penegakan hukum progresif dapat membantu pemerintah dalam mencapai tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 di mana salah satunya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Tanpa berhukum secara progresif, maka korupsi akan selalu menjadi penghambat negara dalam mencapai kesejahteraan rakyat dan rakyat adalah pihak yang paling dirugikan bilamana kerugian negara tidak berhasil dikembalikan.

KESIMPULAN

Kendala yang mempengaruhi proses pembayaran pidana uang pengganti meliputi *pertama*, faktor undang-undang yaitu Pasal 18 ayat (3) Undang-undang No 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memberikan celah hukum yang bersifat kompromistis kepada pelaku untuk mengganti pidana uang pengganti dengan pidana penjara. *Kedua*, faktor penegak hukum yang sedari awal tidak segera melakukan pelacakan dan pembekuan terhadap uang/aset yang diduga keras hasil tindak pidana korupsi sehingga menyilitkan jaksa pada saat akan mengeksekusi pidana uang pengganti. *Ketiga*, modus operandi pelaku melalui pencucian uang dengan cepat sampai pada tahap *integration*, terlebih terdapat rentan waktu yang lama antara waktu terjadinya tindak pidana korupsi dengan proses penyidikan.

Model penegakan hukum progresif untuk mengembalikan kerugian keuangan negara adalah dengan mengubah paradigma dan cara pandang penegak hukum dari berhukum positivistik ke arah berhukum progresif dan memandang bahwa sanksi pidana yang tepat diterapkan dalam tindak pidana korupsi adalah sanksi yang berorientasi mengejar uang/aset hasil korupsi (*follow the money and asset recovery*) dengan melakukan pelacakan, pembekuan dan penyitaan aset yang diduga hasil tindak pidana korupsi sejak tahap penyidikan diikuti

korupsi dapat memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat.

dengan putusan kewajiban membayar pidana uang pengganti tanpa mensubsidairkannya dengan pidana penjara sehingga tetap membebaskan tanggung jawab hukum kepada terdakwa untuk mengembalikan kerugian keuangan negara melalui uang pengganti. Dengan berhukum secara progresif akan memberikan kontribusi dalam strategi pemberantasan korupsi dan membantu meminimalisasi nilai kerugian negara..

Optimalisasi pidana pembayaran uang pengganti salah satunya terhambat karena adanya ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-undang No 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang seringkali menjadi celah hukum bagi pelaku korupsi untuk bebas dari kewajiban membayar uang pengganti. Oleh karena itu, untuk mengatasi aturan yang bersifat kompromistis penegak hukum terutama penyidik dan penuntut umum sebaiknya melakukan pelacakan, pembekuan dan penyitaan aset sejak tahap penyidikan dan penuntutan terhadap aset pelaku yang diduga hasil tindak pidana korupsi sebagai jaminan pelunasan pidana uang pengganti.

Bagi hakim cq Pengadilan Tipikor sebaiknya membebaskan diri dari belenggu *formalisme-positivisme*, mengubah cara berhukum yang diwariskan oleh mazhab *legisme* dan doktrin proseduralnya ke arah berhukum progresif dengan melakukan terobosan hukum berupa penjatuhan putusan pidana uang pengganti tanpa disubsidairkan dengan pidana penjara sehingga putusan hakim dapat menutup kerugian keuangan negara melalui pidana uang pengganti.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anwar, Yesmil. 2008. *Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Chaerudin dkk. 2008. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Reflika Aditama.
- Damanhuri, Didin S. 2006. *Korupsi Reformasi, Birokrasi dan Masa Depan Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Fuady, Munir. 2004. *Bisnis Kotor, Anatomi Kejahatan Keraf Putih*. PT Citra Aditya Bakti.
- Hartono. 2010. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- HM, Zainudin. 2012. *Abraham Samad*. Ufuk Press.
- Haryanto, Igantius dalam Arya Maheka. Tanpa Tahun. *Mengenali dan Memberantas Korupsi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.
- Ibrahim, Johnny. 2009. *Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum*. ITS Press.
- Mas, Marwan. 2014. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Pope, Jeremy. 2003. *Strategi Memberantas Korupsi, Element Sistem Integrasi Nasional*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Ravena, Dey. 2012. *Wacana Konsep Hukum Progresif Dalam Peegakan Hukum di Indonesia Dalam Hukum Untuk Manusia Kado (tak) Istimewa Fakultas Hukum Untuk Indonesia*. Pilar Utama Mandiri.
- Setiadi, Edi dan Rena Yulia. 2010. *Hukum Pidana Ekonomi*. Graha Ilmu.
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suryantoro, Rifki Budi Putranto dan Anggun Malinda. 2013. *Pemiskinan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Perspektif Analisis Ekonomi Atas Hukum*

Pidana dan Hukum Progresif, dalam Mahrus Ali (Ed), Membumikan Hukum Progresif. Yogyakarta: Aswaja Presindo.

Jurnal

Ali, Mahrus. 2018. '*Proporsionalitas Dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*'. 25 Jurnal Ius Quia Iustum.

Ali, Mahrus dan Ari Wibowo. 2018. '*Kompensasi dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana*'. 33 Jurnal Yuridika.

Anshar dan Suwito. 2018. '*Infera Petita, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang Menerobos Ketentuan Pidana Minimum*'. 11 Jurnal Yudisial.

Amrullah, M Arief. 2005. '*Korupsi, Politik dan Pilkada*'. VII Jurnal Syiar Madani Ilmu Hukum.

Fahmiron. 2016. '*Independensi dan Akuntabilitas Hakim Dalam Penegakan Hukum Sebagai Wujud Independeni dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman*'. 17 Jurnal Litigasi.

Gulio, Nimerodi dan Ade Kurniawan. 2018. '*Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana*'. 47 Jurnal Masalah Hukum.

Mahmud, Ade. 2017. '*Dinamika Pidana Uang Pengganti Akibat Tindak Pidana Korupsi*'. Jurnal Hukum Mimbar Justitia.

Perdana, Putra. 2018. '*Peran Perguruan Tinggi Dalam Menumbuhkan Budaya Anti Korupsi DI Indonesia*'. 47 Jurnal Hukum dan Pembangunan.

Rahardjo, Satjipto. 2005. '*Hukum yang Membebaskan, Jurnal Hukum Progresif*'. 1 Jurnal Hukum Progresif.

Sahlan, Mohammad. 2016. '*Unsur Menyalahgunakan Kewenangan Dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kompetensi Absolut Peradilan Administrasi*'. 23 Jurnal Ius Quia Iustum.

Sapardjadja, Komariah Emong. 2005. '*Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sejarah Undang-undang*

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi'. 3 Jurnal Ilmu Hukum.

Sinaga, Christin Juliana. 2017. '*Kajian Terhadap Pidana Penjara Sebagai subsider Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi*'. 11 Jurnal Wawasan Yuridika.

Syamsudin, M. 2008. '*Kecenderungan Paradigma Berfikir Hakim dalam Memutus Perkara Korupsi*'. 15 Jurnal Media Hukum.

Yoserwan, 2017. '*Penerapan Fungsi Sekunder Hukum Pidana Oleh Aparat Penegak Hukum Dalam Hukum Pidana Ekonomi*'. 1 Jurnal Nagari Law Review.

Yusuf, Hambali dan Saifullah Basri. 2018. '*Model Penyelesaian Alternatif Perkara Pidana Dalam Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*'. 26 Jurnal Legality.

A. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No 20 TAHUN 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi